

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1 Sejarah Kalimantan Barat

Berdasarkan undang-Undang Darurat Nomor 3/1953, pada tanggal 7 Januari 1953, tentang Pembentukan Resmi Provinsi Kalimantan sebagai Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953, kemudian mensyahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, yang memecahkan Provinsi Kalimantan menjadi tiga daerah otonom yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957, yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima Jabatan dari Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan kepada ketiga Residen/Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pada tanggal 10 Januari 1957. Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dibentuklah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Tingkat I dengan komposisi saat itu terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Tingkat II, yaitu Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kotapraja Pontianak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, nama Daerah Tingkat II diganti dengan nama Kabupaten dan untuk Kotapraja Pontianak menjadi Kota Pontianak. Atas dasar Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1956, Kalimantan Barat mendapat status sebagai daerah Provinsi Otonom dengan ibukota Pontianak. Sejak ditetapkannya sebagai Daerah Provinsi Otonom, yaitu pada 1 Januari 1957, maka sampai saat ini Kalimantan Barat telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Pejabat Gubernur Kepala Daerah dan dibantu 9 (sembilan) orang Wakil Gubernur.

2.1.2 Kondisi Geomorfologi

Gambar. 2.1 Peta Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: www.google.com

2.1.2.1 Batas Wilayah

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah propinsi Kalbar adalah :

1. Utara : Sarawak (Malaysia)

2. Selatan : Laut Jawa & Kalteng
3. Timur : Kalimantan Timur
4. Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Sebelah utara Kalbar terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang Kapuas Hulu.

2.1.2.2 Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia. Pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km²), kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur (204.534 km²) dan ketiga adalah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km²). Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km² atau 21,28 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya.

2.1.2.3 Jenis Tanah

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang “Lembah Kapuas” serta Laut Natuna/Selat Karimata.

Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (*podsolet merah kuning*), yang meliputi areal sekitar 9,2 juta hektar atau 63,81 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (*orgosol, gley dan humus*) dan tanah Aluvial sekitar 3,3 juta hektar atau 22,17 persen yang terhampar di seluruh kabupaten/kota, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

2.1.2.4 Angin dan Udara

Faktor yang merupakan ciri umum bagi suatu daerah dataran rendah di daerah tropis adalah suhu udara yang relatif panas atau tinggi, sedangkan khusus daerah Kalimantan Barat

suhu yang tinggi ini diikuti pula dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari Stasiun Meteorologi Supadio Kubu Raya yang meliputi Stasiun Meteorologi (SM) Supadio Pontianak, SM Maritim Kota Pontianak, SM Pangsuma Putussibau, SM Paloh Sambas, SM Susilo Sintang, SM Nanga Pinoh Melawi dan Stasiun Klimatologi Siantan Kabupaten Pontianak, umumnya suhu udara di daerah Kalbar cukup normal namun bervariasi, yaitu rata-rata sekitar 25,60C sampai dengan 29,30C.

Selama tahun 2014, temperatur udara di Kalimantan Barat maksimum mencapai 37,90C. yang terjadi di stasiun meteorology Maritim Kota Pontianak pada bulan Juli 2014. Sementara itu, temperatur minimum tercatat 17,30C yang terjadi di stasiun meteorologi Paloh Kabupaten Sambas pada bulan Februari 2014.

Pada umumnya, kecepatan angin di Kalimantan Barat dari beberapa stasiun meteorologi, sepanjang bulan ditahun 2013, secara rata-rata 1 hingga 7 knot/jam sedangkan maksimum tercatat sebesar 30 knot/jam terjadi di stasiun meteorology Kabupaten Kubu Raya pada bulan Oktober 2013.

2.1.3 Kondisi Demografi

2.1.3.1 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk berjumlah sekitar 4,716 juta jiwa, dimana sekitar 2,403 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,313 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 32 Jiwa per kilometer persegi.

Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya. Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 41 jiwa. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang.

Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8 (delapan) jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km²) dihuni oleh sekitar 598.097 jiwa, rata-rata sekitar 5.548 jiwa per kilometer persegi.

2.1.3.2 Ketenagakerjaan

Penduduk berumur lima belas tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja, di mana pada usia ini merupakan sumber tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan.

Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat, masih didominasi oleh pekerja yang ber pendidikan rendah, yaitu sekitar 73,36 persen adalah tamat SLTP kebawah. Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yaitu menyerap sekitar 57,76 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 sebanyak 2.320.229 orang, dimana 2.226.510 orang diantaranya bekerja (95,96 persen). Dengan demikian, Angkatan Kerja Kalimantan Barat yang belum terserap pada pasar kerja pada tahun 2014 adalah 93.719 jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pengangguran terbuka sebesar 4,04

persen. Sedangkan untuk yang bukan Angkatan Kerja adalah 997.833 jiwa dimana sekitar 33,82 persennya bersekolah atau berjumlah 337.474 jiwa, mengurus rumahtangga 520.227 jiwa (52,14 persen) dan lain-lain sebanyak 140.132 orang (14,04 persen).

2.1.3.3 Transmigrasi

Sementara di Tahun 2014 realisasi penempatan transmigrasi menurut daerah asal terdapat sebanyak 160 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 580 Jiwa. Lokasi penempatan terbanyak di Kabupaten Kayong Utara. Dilihat dari asal para transmigran khusus yang berasal dari luar Kalimantan Barat, terbanyak berasal dari Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 30 KK, dan 25 KK.

Secara umum, transmigrasi baik yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat maupun luar Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 hanya ditempatkan di dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Kayong Utara 120 KK, dan Kabupaten Kubu Raya 40 KK

2.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi

2.1.4.1 Pendidikan

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui sektor

pendidikan. Sektor pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan sarana dan prasana yang baik. Jumlah prasarana SD meningkat dari 4.223 tahun 2013/2014 menjadi 4.320 pada tahun 2014/2015 kenaikan terjadi pada SD negeri dan swasta yaitu negeri naik dari 4.012 pada tahun 2013/2014 menjadi 4.102 pada tahun 2014/2015 sedangkan jumlah SD swasta naik dari 211 pada tahun 2013/2014 menjadi 218 pada tahun 2014/2015. Demikian pula jumlah murid SD meningkat 3,28 persen dari tahun sebelumnya atau meningkat dari 605.822 murid pada tahun 2013/2014 menjadi 625.721 murid pada tahun 2014/2015.

Pada tahun 2013/2014 jumlah guru sebanyak 37.748 orang, periode berikutnya meningkat menjadi 37.821 orang. Pada tahun 2013/2014 rasio murid-guru sebanyak 16, artinya satu orang guru dibebani mengajar murid sebanyak 16 orang. Tahun 2014/2015 rasio tersebut meningkat sebanyak 16,5. Demikian juga untuk rasio guru terhadap sekolah, pada tahun 2014/2015 satu sekolah tersedia sebanyak 11 orang guru. Untuk tingkat SLTP jumlah prasarana bertambah menjadi 1.209 unit atau meningkat 3,07 persen demikian juga jumlah murid meningkat menjadi 216.003 orang atau meningkat sekitar 5,66 persen dari 2013/2014.

Untuk jenjang pendidikan menengah umum (SMU), jumlah sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2014/2015 menjadi sebanyak 364 unit dan untuk jumlah murid mengalami peningkatan dari 96.185 orang pada tahun 2013/2014 menjadi 103.758 orang pada tahun 2014/2015. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlah sekolah mengalami peningkatan dari 169 menjadi 179,. Pada tahun 2013/2014 jumlah guru 2.914 orang meningkat menjadi 3.750 orang pada tahun 2014/2015, sedangkan untuk jumlah murid 2013/2014 berjumlah 48.807 menurun menjadi 47.788 pada tahun 2014/2015

2.1.4.2 Perekonomian

Perekonomian di wilayah perbatasan Kalimantan Barat masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari persentase terhadap total PDRB di tiap-tiap Kabupaten. Walaupun hampir semuanya mengalami penurunan persentase, tetapi sektor pertanian ini masih merupakan tulang punggung perekonomian terutarna di daerah perbatasan.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan seperti perdagangan lintas batas jika dilihat dari volume maupun nilainya cukup besar, dan wilayah perbatasan sebagai perlintasan anis keluar masuk barang dan jasa tampaknya sudah mulai menjadi pusat aktivitas perdagangan. Adanya

permintaan (demand) terhadap barang atau jasa dari Kalimantan Barat oleh Sarawak, demikian juga sebaliknya dari Kalimantan Barat Ke Sarawak, akan menggerakkan perdagangan di wilayah perbatasan.

Izin berbelanja bagi masyarakat perbatasan sebesar 600 Ringgit Malaysia per bulan, merupakan kesepakatan antara Pemerintah RI dan Malaysia, untuk memudahkan masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan sembako. Hal ini juga ikut mendorong aktivitas perdagangan di perbatasan.

Sedangkan dilihat dari sebaran jenis industri mikro (Gambar 7) industri anyaman menjadi industri paling banyak di kecamatan perbatasan persentase sebesar 82,23%. Pengrajin anyaman paling banyak terdapat di Desa Jagoi dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang dengan jumlah masing-masing sebanyak 217 dan 210 industri.

2.1.4.3 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya diarahkan pada usaha pembangunan fisik saja, melainkan juga mengupayakan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik. Usaha tersebut menyangkut masalah hak fakir miskin, penderita cacat, korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya untuk mendapat

pelayanan tersendiri/khusus dari pemerintah sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1995.

Penyebab terjadinya tindak kejahatan yaitu dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Sebagai indikator keamanan, maka statistik kriminal perlu diamati dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2013 adalah pencurian (2.875 kasus) kemudian diikuti oleh pencurian sepeda motor (1.089 kasus).

2.1.5 Pemerintahan

2.1.5.1 Kepala Daerah Pemerintah

Sejak resmi lahirnya Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 1 Januari 1957, terdapat sebelas orang gubernur yang menjabat sebagai Kepala Daerah (KDH). Gubernur KDH Tk I yang pertama adalah Adji Pangeran Aflus (1957-1957) dan dilanjutkan oleh Djenal Asikin Judadibrata (1958-1959). Gubernur KDH ketiga adalah putera daerah YC Oevang Oeray yang menjabat selama enam tahun, yaitu pada tahun 1960-1966. Kemudian pengabdian Oevang dilanjutkan oleh Gubernur keempat yaitu Soemadi Bc Hk pada periode 1967-1972 dan periode berikutnya adalah Kadarusno (1972-1977). Soejiman menjabat selama dua periode (1977-1988) dan

kemudian dilanjutkan oleh Parjoko S (1988-1993). Periode 1993-2003, dijabat oleh H. Aspar Aswin. Periode 2003-2008 dijabat oleh H. Usman Ja'far, periode 2008-2013 dan 2013-2018 dijabat oleh Drs. Cornelis, M.H.

Gambar. 2.1 Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 1957 s.d 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, periode 1957 S/D 2018		
1.	ADJI PANGERAN AFLOES	(1957 s/d 1958)
2.	DJENAL ASIKIN JUDADIBRATA	(1958 s/d 1959)
3.	CHRISOSTOMUS OEVAANG OERAY	(1960 s/d 1966)
4.	Kolonel SOEMARDI, Bc.H.K.	(1967 s/d 1972)
5.	Kolonel KADARUSNO	(1972 s/d 1977)
6.	Mayjen (Purn) H. SOEDJIMAN	(1977 s/d 1987)
7.	Brigjen. TNI (Purn) H. PARIOKO SURYOKUSUMO	(1987 s/d 1993)
8.	Mayjen TNI (Purn). H. ASPAR ASWIN	(1993 s/d 2003)
9.	H. USMAN JA'FAR	(2003 s/d 2008)
10.	Drs. CORNELIS, MH	(2008 s/d 2013) & (2013 s/d 2018)

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1960 S/D 2018		
1.	Kolonel IWAN SOEPARDI	(1960 s/d 1964)
2.	Kolonel SOEMADI, BcHk	(1965 s/d 1966)
3.	Drs. H. ABASSUNI ABUBAKAR	(1983 s/d 1987)
4.	Drs. H. JIMMI M. IBRAHIM	(1987 s/d 1992)
5.	Drs. H. MUCHALLI THAUFIEK	(1992 s/d 1997)
6.	H. SYARIFUDDIN LUBIS, SH,	(1998 s/d 1999)
7.	Drs. H. DJAWARI	(1999 s/d 2003)
8.	Drs. L.H. KADIR	(2003 s/d 2008)
9.	Drs. CRISTIANDY SANJAYA, SE, MM	(2008 s/d 2013) & (2013 s/d 2018)

Sumber: Bappeda Kalimantan Barat, 2016

2.1.5.2 Daerah Pemerintah

Saat ini, Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi menjadi 1.986 desa/kelurahan. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten

Sambas (19 kecamatan, 183 desa), Kabupaten Bengkayang (17 kecamatan, 124 desa/kelurahan), Kab. Landak (13 kecamatan, 156 desa) Kab. Pontianak (9 kecamatan, 67 desa/kelurahan), Kab. Sanggau (15 kecamatan, 169 desa/kelurahan), Kab. Ketapang (20 kecamatan, 249 desa/kelurahan), Kab. Sintang (14 kecamatan, 287 desa/kelurahan), Kab. Kapuas Hulu (23 kecamatan, 282 desa/kelurahan), Kab. Sekadau (7 kecamatan, 87 desa), Kab. Melawi (11 kecamatan, 169 desa), Kab. Kayong Utara (6 kecamatan, 43 desa), Kab. Kubu Raya (9 kecamatan, 115 desa/kelurahan), ditambah Kota Pontianak (6 kecamatan, 29 kelurahan) dan Kota Singkawang (5 kecamatan, 26 kelurahan).

2.2 Profil Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi

Kalimantan Barat

2.2.1 Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak

membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan (LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*) (LPSE Kalimantan Barat, 2016).

2.2.2 Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114/DISHUBKOMINFO/2015 tentang Penunjukkan Personil Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Barat, susunan pengelola LPSE adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Susunan Pengelola LPSE

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM LPSE
1	Gubernur Kalimantan Barat	Pembina
2	Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar	Penanggung Jawab
3	Kepala Unit PDE Dishubkominfo Prov. Kalbar	Ketua
I. Bidang Sekretariat		
4	Kepala Seksi Sistem Program dan Administrator	Sekretaris
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
6	Kepala Seksi Operasi Data Elektronik	Anggota
7	Bendahara	Anggota
8	Pengadministrasian Umum	Anggota
II. Bidang Administrasi Sistem Elektronik		
9	Pengendali Jaringan Sistem Komputer	Koordinator (Administrator)
III. Bidang Registrasi dan Verifikasi		
10	Pranata Pemetaan Jaringan	Koordinator (Verifikator)
11	Pengelola Dokumentasi Informasi Publik	Anggota
IV. Bidang Layanan dan Dukungan		
12	Analisis Data dan Informasi	Koordinator (Help Desk)
13	Penyusun Data dan Informasi	Anggota

Sumber: Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 114/DISHUBKOMINFO/2015

2.2.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya (LPSE Kaltim, 2016).

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

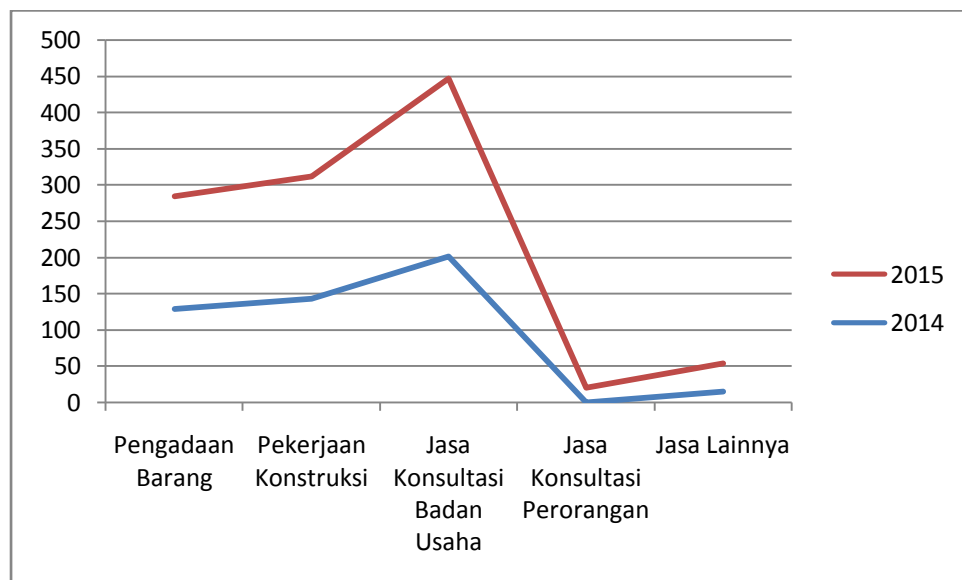
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan *E-Procurement* melalui situs <http://lpse.kalbar.go.id/> semenjak tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian melalui website, LPSE Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 telah melaksanakan lelang sebanyak 1.117 paket lelang yang terdiri dari Pengadaan Barang sebanyak 284 paket, Pekerjaan Konstruksi 312, Jasa Konsultasi Badan Usaha 447 paket, Jasa Konsultasi Perorangan 20 paket dan Jasa Lainnya 54 paket (data diolah melalui LPSE Kalimantan Barat, 2016). Berikut ini disajikan tabel peserta lelang *e-procurement* tahun 2014-2015

Tabel. 2.2 Paket Lelang Kalimantan Barat tahun 2014-2015

No	JENIS LELANG	PAKET LELANG	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	129	155
2	Pekerjaan Konstruksi	143	169
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	201	246
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	20
5	Jasa Lainnya	15	39
	Total	488	629

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Grafik. 2.1 Paket Lelang *E-Procurement* Kalimantan Barat Tahun 2014-2015



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan Tabel. 2.2 dan Grafik. 2.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014-2015 LPSE Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan *e-procurement* mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke 2015 seperti tabel di atas.

Berdasarkan sampel yang digunakan sebanyak 10% , pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 berhasil melakukan lelang sebanyak 51 paket lelang dan tahun 2015 sebanyak 61 Paket lelang. Sehingga pada tahun 2014-2015 berhasil melaksanakan lelang sebanyak 112 paket lelang (LPSE, Kalbar 2016). Berikut adalah tabel paket lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik Pemerintah melalui LPSE Kalimantan Barat Tahun 2014-2015.

Tabel. 2.3 Sampel 10% Paket Lelang *E-Procurement* Tahun 2014-2015

No	JENIS LELANG	PAKET LELANG	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	12	15
2	Pekerjaan Konstruksi	14	16
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	23	25
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	2
5	Jasa Lainnya	2	3
	Total	51	61

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan tabel 2.3 diatas pada tahun 2014 LPSE Kalimantan Barat telah melakukan lelang berupa Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi Badan Usaha dan Jasa Lainnya serta tidak melakukan lelang Jasa konsultasi Perorangan. Sedangkan pada Tahun 2015 berhasil melakukan lelang Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi Badan Usaha, Jasa Konsultasi Perorangan dan Jasa Lainnya. Dari data yang telah diambil sebanyak 10% dari total 1.117 pengadaan barang dan jasa pada tahun 2014-2015 yang paling banyak melakukan pengadaan barang dan jasa adalah Jasa Konsultasi Badan Usaha sebanyak 49 paket pengadaan, kemudian Pekerjaan Konstruksi sebanyak 30 paket pengadaan, Pengadaan Barang sebanyak 27 paket pengadaan, dan Jasa Lainnya sebanyak 5 paket pengadaan serta Jasa Konsultasi Perorangan 2 paket pengadaan (data diolah melalui website LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Tahun 2014-2015 untuk jumlah peserta lelang dalam pelaksanaan *e-procurement* sangat bervariasi dan kompetitif sehingga didapat rata-rata satu kali paket lelang mencapai 18 – 30 perusahaan peserta lelang. Berikut ini disajikan tabel jumlah peserta lelang *e-procurement* pada tahun 2014-2015.

Tabel. 2.4 Jumlah Peserta Lelang *E-Procurement* Tahun 2014-2015

No	JENIS LELANG	JUMLAH PESERTA LELANG	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	165	295
2	Pekerjaan Konstruksi	386	507
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	382	324
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	19
5	Jasa Lainnya	165	72
	Total	963	1217

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan Tabel. 2.4 diatas didapatkan total peserta lelang layanan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2014-2015 adalah sebanyak 2.180 yang terdiri peserta dari perusahaan lokal daerah dan luar daerah. Untuk Pekerjaan Konstruksi pada tahun 2014 dan 2015 paling banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan terbukti dengan jumlah paling banyak yaitu ada 893 peserta yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Dapat diketahui perusahaan yang mengikuti lelang di LPSE Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 telah menunjukkan kompetitif. Berdasarkan hal tersebut untuk bisa dikatakan kompetitif menurut aturan yang berlaku lelang dapat terlaksana dengan kompetitif apabila diikuti minimal lima perusahaan yang ikut bersaing.

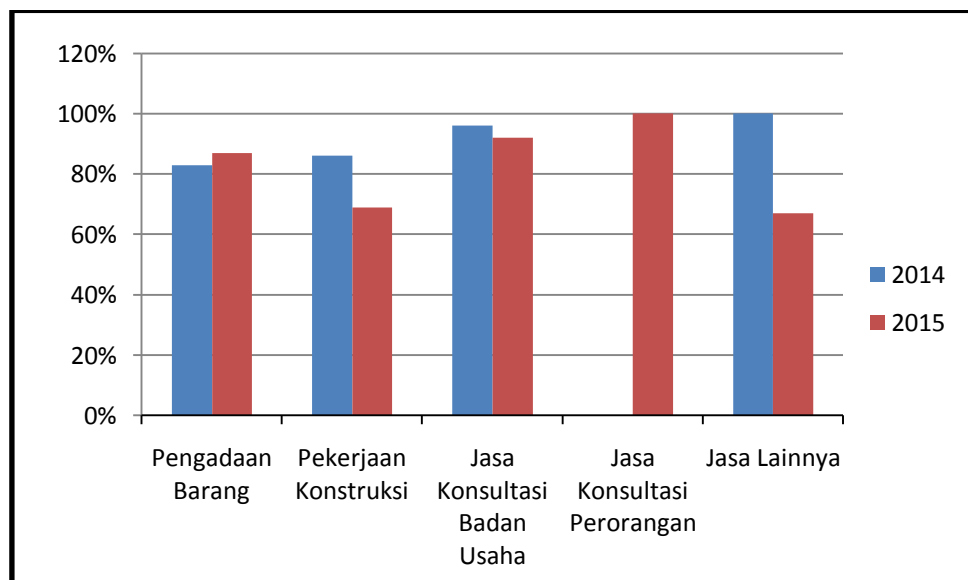
Berikut ini disajikan data yang menunjukkan prosentase jumlah pemenang dari dalam daerah maupun luar daerah.

Tabel. 2.5 Prosentase Pemenang Lelang *E-Procurement* Lokal Daerah 2014-2015

No	JENIS LELANG	PROSENTASE	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	83 %	87 %
2	Pekerjaan Konstruksi	86 %	69 %
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	96 %	92 %
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	100%
5	Jasa Lainnya	100%	67 %
	Rata-rata	91 %	83 %

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Grafik. 2.2 Prosentase Pemenang Lelang *E-Procurement* Lokal Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

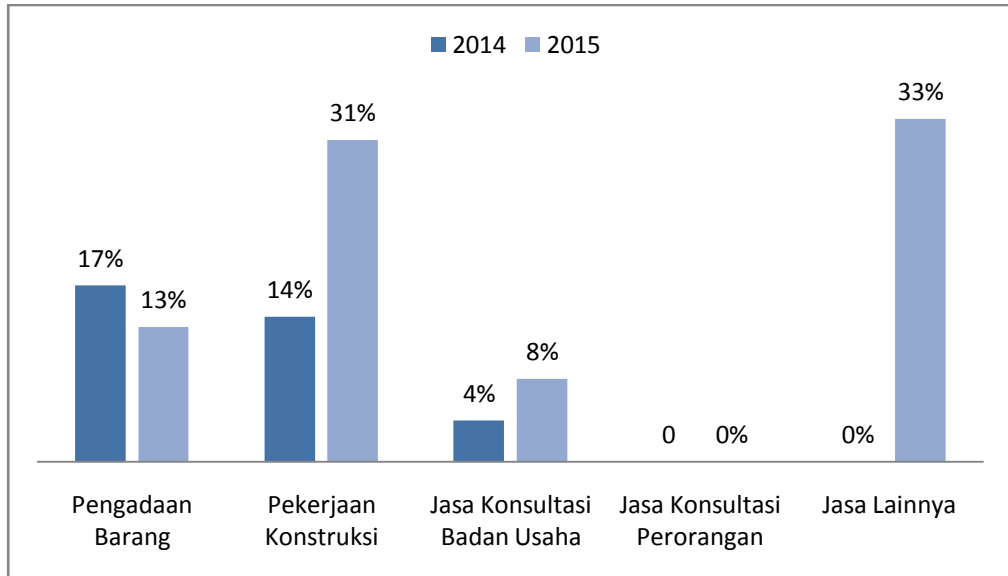
Berdasarkan Grafik. 2.2 diatas dapat kita lihat prosentase pemenang lelang dari lokal daerah perbedaanya hanya sedikit dan pada tahun 2014 tidak ada paket lelang jasa konsultasi perorangan.

Tabel. 2.6 Prosentase Pemenang Lelang *E-Procurement* Luar Daerah 2014-2015

No	JENIS LELANG	JUMLAH PESERTA LELANG	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	17 %	13 %
2	Pekerjaan Konstruksi	14 %	31 %
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	4 %	8 %
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	0 %
5	Jasa Lainnya	0 %	33 %
	Rata-rata	9 %	22 %

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Grafik. 2.3 Prosentase Pemenang Lelang *E-Procurement* Luar Daerah 2014-2015



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

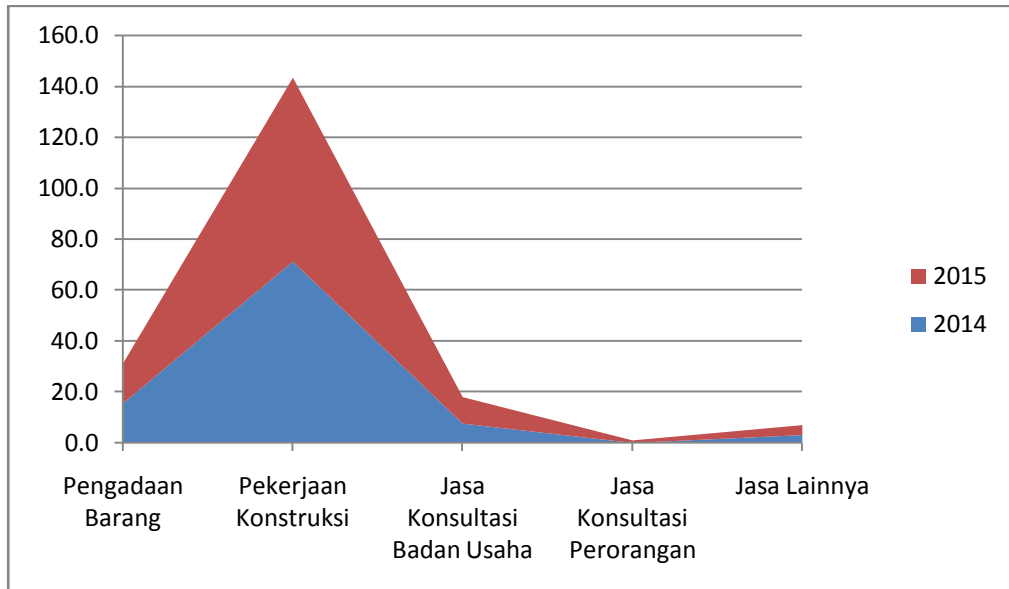
Berdasarkan Grafik. 2.3 diatas dapat kita lihat prosentase pemenang lelang dari luar daerah rata-rata tahun 2014 adalah 9 % dan rata-rata tahun 2015 adalah 22 %. Sehingga pemenang lelang masih didominasi oleh perusahaan lokal.

Tabel. 2.7 Daftar Harga Setelah lelang *E-Procurement* Tahun 2014-2015

No	JENIS LELANG	HARGA SETELAH LELANG	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	Rp 15.647.273.100,-	Rp 15.724.900.600,-
2	Pekerjaan Konstruksi	Rp 71.261.002.700,-	Rp 72.095.763.000,-
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	Rp 7.693.075.250,-	Rp 10.404.614.375,-
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	Rp 241.305.000,-
5	Jasa Lainnya	Rp 3.144.974.800,-	Rp 1.908.630.000,-
	Total	Rp 97.746.325.850,-	Rp 100.375.212.975,-

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Grafik. 2.4 Daftar Harga Setelah lelang *E-Procurement* Tahun 2014 - 2015



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016

Berdasarkan Tabel. 2.7 dan Grafik. 2.4 diatas dapat kita lihat bahwa harga setelah lelang pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pekerjaan lelang yang dilakukan bertambah banyak dan pekerjaan konstruksi yang paling banyak mengeluarkan anggaran.